ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI BORONGAN HASILTANGKAPAN NELAYAN MAYANGAN di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

SKRIPSI

Oleh:

EKO WAHYUDI NIM: C02205089



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH SURABAYA 2012

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI BORONGAN HASILTANGKAPAN NELAYAN MAYANGAN di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah



EKO WAHYUDI NIM: C02205089

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS No. REG : K.2012/M/86

5.20/2 ASAL BUKU:

086 TANGGAL:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH SURABAYA 2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh EKO WAHYUDI ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang munaqasah.

> Surabaya, 12 Juli 2012 Pembimbing,

<u>Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.</u> NIP. 195511181031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eko Wahyudi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag NIP.195511181031003

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, S.Si, M.EI NIP.198106062009012008

Penguji I,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag.

NIP.196303271999032001

Penguji II,

Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, M.H.

NIP.196803292000032001

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Hadi, M.A.

NIP.195511181031003

Surabaya, 07 Agustus 2012 Mengesahkan, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan.

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Lamongan". Penelitian ini betujuan untuk menjawab (1) Bagaimana praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Lamongan? (2) Bagaimana pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Lamongan? (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat mayoritas tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Lamongan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaalah metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan praktek jual beli borongan dan pendapat tokoh agama terhadap praktek jual beli borongan secara umum kemudian dijelaskan secara rinci satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan akhir. Guna mendapatkan data penulis mengunakan teknik pengumpulan data observasi patisipasi dan wawancara tidak terstruktur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 3 (tiga) hal,

- 1. Praktek jual beli borongan nelayan *Mayangan* yaitu menjualbelikan seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal dengan pembayaran dilakukan secara kontan maupun panjar yang sisanya diberikan setelah pembongkaran serta ganti rugi nelayan terhadap pemborong dilakukan secara suka rela maupun mematok harga sesuai dengan kadar kerugiannya.
- 2. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama, dan mayoritas tokoh agama tidak membolehkan praktek jual beli borongan karena kondisi hasil tangkapan yang tidak dapat dipastikan jumlah dan kualitasnya.
- 3. Pengambilan pnetapan hukum jual beli borongan dengan mengunakan qiyas dan adat kebiasaan.

Sejalan dengan penelitian diatas dapat disimpulkan, bahwa mayoritas tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tidak memperbolehkan praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* karena jual beli tersebut bertentangan dengan syara'. Maka hendaknya KUD. Minatani sebagai penyelenggara jual beli di tempat perlelangan ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong mengupayakan kembali sistem perlelangan secara efektif, dan hendaknya para nelayan mayangan memperhatikan sistem jual beli yang mampu memberi keuntungan bagi pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur manipulasi dalam jual beli yang dilakukan.

DAFTAR ISI

SAMPUL	DALAM	i
PERSETU	JJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESA	AHAN	iii
	BAHAN	
MOTTO.		v
ABSTRA	K	vi
KATA PE	NGANTAR	vii
	ISI	
DAFTAR	TABEL	xii
DAFTAR	TRANSLITERASI	xii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	
	B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	
	C. Rumusan Masalah	
	D. Kajian Pustaka	
	E. Tujuan Penelitian	
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	
	G. Definisi Operasional	
	H. Metodologi Penelitian	
	I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
וו עאט	A. Pengertian Jual Beli	24
	B. Rukun dan Syarat Jual Beli	
	C. Macam-macam Jual Beli	
	C. Macam-macam Juai Ben	55
BAB III	PRAKTEK JUAL BELI BORONGAN HASIL TANGKAPAN	
	NELAYAN MAYANGAN DI KELURAHAN BLIMBING	
	KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	
	A. Gambaran Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten	20
	Lamongan	
	1. Keadaan Geografis	39
	2. Keadaan Demografis	40
	B. Deskripsi Tentang Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan <i>Mayangan</i> di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran	
	Kabupaten Lamongan.	45

	1. Latar Belakang Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	15
2	2. Proses Pelaksanaan Praktek Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan <i>Mayangan</i> di Kelurahan Blimbing	46
C. I	Pro kontra pendapat Tokoh Agama tentang hukum jual beli	
1	borongan	50
		50
	2. KH. Umar Ali	
	3. K.H. Kartono Ali	
	4. K.H. Afnan Anshari	
	5. Ahmad Munir	
(6. K.H. Turmudzi	59
PEN BO KE	IALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAYORITA NDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BEL PRONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN <i>MAYANGAN</i> G LURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAL	.I di
KA	BUPATEN LAMONGAN	
يـ	Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan <i>Mayangan</i> di Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan Pendapat Mayoritas Tokoh Agama Terhadap Hukum Jual Beli	61
	Borongan Hasil Tangkapan Nelayan <i>Mayangan</i> di Kelurahan	
C. A		64
		66
BAB V PEN	NUTUP	
		69
	1	70
DAFTAR PUS	STAKA	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Batas Wilayah Kelurahan Blimbing	40
Tabel 2	Batas Wilayah Kelurahan Blimbing	40
Tabel 3	Jumlah Penduduk Kelurahan Kel. Blimbing	41
Tabel 4	Jumlah Penduduk Agama Kel. Blimbing	43
Tabel 5	Jumlah Masjid dan Musholla	43
Tabel 6	Tingkat Pendidikan Penduduk	44
Tabel 7	Remaja Putus Sekolah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Sesuai firman Allah swt dalam surat Al-Qas {a}ayat 77 yang berbunyi:

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Q.S. Al-Qas{a}?77).¹

Mencari karunia Allah terdapat banyak cara untuk manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya, ada yang bekerja sebagai pekerja kantor, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Proses yang dijalankan dalam interaksi kesehariannya berbeda-beda seperti pedagang dan nelayan dalam kesehariannya menjalankan proses jual beli, pedagang memperjual belikan barang dagangannya dan nelayan menjual hasil tangkapannya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, Cet. III, 2002), 556

Jual beli merupakan kebutuhan d{orardalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli². Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia ditunt ut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatau sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Oleh karena itulah agama Islam mensyariatkan jual beli yang telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sesuai firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. Al-Bagarah: 275).3

Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. dan berdasarkan ijma' ulama' hukum Jual beli adalah mubah.⁴ Artinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Allah berfirman:

² Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

<sup>120.

&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57 ⁴Bustamam Ismail, "Hukum Islam Tentang Muamalah," dalam http://wordpress.com (23 November 2007)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu'. (Q.S. An-Nisa': 29).⁵

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi⁶. Suatu jual beli menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.⁷

Merupakan suatu kenyataan yang tak terhindarkan dalam sejarah telah terjadinya perubahan dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern, perubahan kehidupan pedesaan yang berbasis ekonomi pertanian kepada kehidupan perekonomian perkotaan yang berbasis ekonomi industri dan perdagangan, perubahan dari pola hubungan paguyuban dan gotong royong kepada pola hubungan individu dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini tentunya

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (*Nor Hasanuddin,Dkk, Fiqih Sunnah 4*) (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2004), 12

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27

mempengaruhi cara pandang (sikap dan mental) dan perilaku masyarakat terhadap harta dan teknis bertransaksi.

Misalnya, konsep harta dalam masyarakat agraris tentu berbeda dengan konsep harta yang berkembang dalam masyarakat industri dan perdagangan. Dalam masyarakat industri dan perdagangan harta berfungsi sebagai modal dan komoditas, sedang dalam masyarakat agraris harta berfungsi sebatas untuk memenuhi hajat hidup.⁸

Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru, tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih berhati-hati dalam berbagi model transaksi yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan.

Fenomena ini terjadi terhadap jual beli hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang merupakan daerah dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang sangat menggantungkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nelayan sendiri terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan hasil tangkapan, alat tangkap yang dipergunakan dan ukuran waktu lamanya melaut yaitu: Mayangan, Pancingan, dan Poursine.

⁸ Gufron A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 7

Sistem awal yang diberlakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sebagai sentral kegiatan nelayan untuk menjualbelikan hasil tangkapannya adalah sistem lelang yaitu jual beli ikan dilakukan sesuai dengan harga yang paling tinggi yang ditawar oleh pembeli, namun dalam penerapannya sistem tersebut belum maksimal sebagai sistem jual beli hasil tangkapan nelayan. Hal tersebut sebagian besar dikarenakan terjadinya monopoli oleh pemilik kapal dan pemodal atas hasil tangkapan nelayan.

Adanya keterikatan antara nelayan kepada agen menyebabkan harga ikan yang didapat oleh nelayan tidak pada posisi tawar tertinggi, karena kebanyakan para nelayan tidak mengetahui harga ikan, pengambilan keuntungan perkilogram dari harga ikan dan kebanyakan pula sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara nelayan dan pedagang (pemilik kapal dan pemodal). Menurut Ketua Rukun Nelayan (RN) Ali Fadhol para nelayan terlalu pasrah terhadap agen, artinya nelayan menyerahkan semua harga ikan terhadap harga yang ditetapkan oleh agen tanpa mampu merubah harga jual ikan hasil tangkapan mereka.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah turunnya mentalitas nelayan untuk menjangkau Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, hal ini disebabkan karena harga ikan

⁹ Ali Fadhol, *Wawancara*, Lamongan, 23 Pebruari 2012

yang dijual nantinya tidak menguntungkan sehingga tidak mampu mencukupi biaya operasional yang telah dikeluarkan.

Tidak terlaksananya sistem pelelangan dengan baik serta sistem jual beli secara agen yang dirasa kurang menguntungkan nelayan, melahirkan transaksi baru yang memberikan alternatif pilihan nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Alternatif yang ada adalah sistem jual beli borongan, yaitu jual beli hasil tangkapan (ikan) tanpa di timbang, di takar, dan tanpa ukuran tertentu. Akan teta pi mengunakan sistem taksiran.¹⁰

Sistem yang awalnya tidak di minati karena masih kuatnya pengaruh agen sekarang menjadi prioritas utama bagi nelayan *Mayangan* untuk menjual hasil tangkapannya, karena lebih menguntungkan dan bisa menekan tingkat risiko.

Sistem borongan yang diterapkan oleh nelayan *Mayangan* dan pemborong ikan (pembeli) di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah menjual seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal serta di tempatkan pada palkah-palkah (tempat penyimpanan hasil tangkapan) tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu dengan pembayaran baik secara kontan maupun di memberi uang muka terlebih dahulu dan sisanya diberikan setelah pembongkaran selesai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh

Ahamad Sabiq, "Apa Hukum Jual Beli Borongan," dalam <u>www.konsultasisyariah.com</u> (30 April 2010)

kedua belah pihak dan apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh nelayan.

Namun, dengan kondisi hasil tangkapan yang mempunyai variasi jenis dengan tingkat harga yang berbeda-beda disesuaikan dengan kualitas jenis, ukuran dan kesegaran serta kondisi pasar yang tidak stabil menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi bagi pemborong, maka untuk mengantisipasinya pemborong memeriksa terlebih dahalu kondisi hasil tangkapan dan meminta informasi kepada nelayan karena pemborong tidak memungkinkan melihat seluruh hasil tangkapan.

Melihat kondisi hasil tangkapan yang tersebut di atas, menjadikan jual beli tersebut rawan akan tipu daya dari penjual ataupun pembeli itu sendiri dari salah satu kasus menunjukkan adannya pembatalan akad yang diakibatkan ketidaksesuaian kondisi hasil tangkapan dengan kenyataanya setelah hasil tangkapan dibongkar, sedangkan dalam jual beli sendiri dituntut akan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, karena jual beli dianggap tidak sah apabila mengandung penipuan.¹¹

Perubahan dalam budaya masyarakat tidak sekaligus dibarengi dengan kesepakatan oleh seluruh masyarakat itu sendiri, sehingga terdapat pro dan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, (Nor Hasanuddin,Dkk, Fiqih Sunnah 4*) (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2004), 131

kontra dalam menyikapinya. Hal ini seperti sikap dari para tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam menyikapi perubahan sistem jual beli borongan yang beberapa tahun ini banyak diterapkan oleh para penjual dan pembeli di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Sikap pro dan kontra mengenai hukum jual beli borongan terjadi pada kalangan tokoh agama setempat diakibatkan karena jual beli ini merupakan jual beli yang dianggap baru dalam penerapannya, dan menjadi hal yang kabur atau bias karena jual beli borongan tidak hanya membeli atau menjual ikan satu macam dengan harga yang sama, akan tetapi banyak jenis dengan tingkat harga yang berbeda dengan risiko untung rugi yang tak dapat diperkirakan yang terkadang merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang pendapat tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan"

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasikan masalah umum yang berhubungan dengan pengalaman dan minatnya. Kemungkinan masalah bisa timbul setelah peneliti melihat adanya kesenjangan antara kenyataan dengan apa

yang diharapkan¹². Oleh karena itu masalah yang bersifat umum dan luas perlu dipersempit menjadi suatu masalah yang spesifik dan bisa diselidiki.

Identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Sistem pelelangan yang tidak maksimal dalam penerapannya
- 2. Monopoli penjualan hasil tangkapan oleh pemilik kapal dan pemodal besar.
- 3. Dampak yang ditimbulkan akibat monopoli pemilik kapal dan pemodal besar.
- 4. Sistem baru sebagai pilihan alternatif dalam menjual hasil tangkapan.
- Praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Pro dan kontra tokoh agama terhadap jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah di atas adalah:

- Praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Pro dan kontra tokoh agama terhadap jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

¹² Sunanto, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1995), 15

- Bagaimana praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
- 2. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
- 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat mayoritas tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian lain yang sudah pernah ada dari beberapa hasil penelitian berikut:

Buku Ghufron A. Mas'adi yang berjudul "Fiqh Muamalah Kontektual".
 Dalam buku ini diterangkan secara jelas bentuk bentuk jual beli borongan lengkap dengan pendapat imam mazhab.

- 2. Skripsi Zani Nur Anisah yang berjudul¹³ "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban". Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada unsur mutlak yang harus dilakukan pihak nelayan (pedagang) yakni barang (ikan) harus dijual kepada pembeli secara mutlak karena nelayan sudah mempunyai pinjaman atau hutang kepada pembeli, maka secara tidak langsung nelayan dituntut untuk menjual ikan itu tanpa harus dijual kepada pembeli lain dengan kesimpulan diperbolehkan karena antara penjual dan pembeli saling merelakan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.
- 3. Skripsi Dian Novianti¹⁴ yang berjudul "Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayangan Kabupaten Jombang". Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada transaksi barang (kacang) yang masih berada di dalam tanah, dan pengambilan atau pencabutan kacang baru bisa dilakukan setelah adanya pembayaran secara tunai sesuai dengan kesepakatan dengan kesimpulan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama setempat.

_

¹³ Zani Nur Anisah, "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah, Surabaya, 1999)

¹⁴ Dian Novianti, "Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa *Mayangan* Kabupaten Jombang," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah, Surabaya, 2011)

4. Skipsi Eni Fauziyah¹⁵ yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh)" dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada jual beli padi yang masih ditangkainnya (padi tersebut sudah terlihat, tetapi belum menguning atau belum panen), dan tanggung jawab penjual (petani) ketika terjadi kerusakan terhadap padi tersebut dengan kesimpulan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama setempat.

Namun demikian skripsi yang penulis teliti berbeda dengan skripsi yang tersebut di atas, karena skripsi ini lebih menitikberatkan pada pendapat tokoh agama terhadap praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan
 Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Untuk mengetahui pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

¹⁵ Eni Fauziyah, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh)," (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah, Surabaya, 2011)

3. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori jual beli borongan yang sudah ada.
- 2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melakukan jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum jual beli borongan yang telah dijelaskan

oleh Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama.

Pendapat Tokoh : Pendapat beberapa tokoh agama Islam di

Agama Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan yang dianggap paham dan

mengerti masalah agama Islam, khususnya

tentang fiqih terlebih tentang hukum jual beli,

dan menjadi rujukan masyarakat dalam

menyelesaikan masalah-masalah ke-Islaman.

Jual Beli Borongan : Transaksi jual beli antara nelayan (penjual) dan

pemborong (pembeli) terhadap seluruh hasil

tangkapan nelayan (ikan) yang masih di atas

kapal yang ditempatkan pada palkah-palkah

(tempat penyimpanan hasil tangkapan) tanpa

ditakar, ditimbang, atau tanpa ukuran tertentu,

namun menggunakan sistem taksiran.

Nelayan Mayangan : Salah satu jenis nelayan yang ada di Kelurahan

Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan yang menggunakan jaring (payang)

sebagai alat tangkapannya.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. ¹⁶ Jadi metode ini merupakan langkah- langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dan *setting* penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu, lokasi dan *setting* penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam¹⁷. Hal ini penting karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Selanjutnya penting juga dipertimbangkan apakah lokasi dan *setting* penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji, seperti komunitas nelayan, tokoh agama, dan instansi terkait.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka kemudian peneliti menetapkan bahwa lokasi penelitian adalah wilayah desa yang sedang

Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3

¹⁷ Burhan Bungin ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 148

melakukan perubahan bentuk jual beli hasil tangkapan nelayan yaitu Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi ini karena selain penulis mempunyai hubungan kultur dan emosional yang kuat sehingga penulis mudah untuk melakukan penelitian.

2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi:

- a. Data tentang praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan
 Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten
 Lamongan.
- b. Data tentang pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang digali langsung dari lapangan.
 Yakni:
 - 1. Nelayan Mayangan (Penjual)
 - 2. Pemborong (Pembeli), dan
 - Tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

- b. Sumber Data Skunder, yaitu data dari pustaka sebagai pelengkap data primer antara lain buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini, antara lain:
 - 1) Sayyid Sabiq, Terjemahan Fighus Sunnah Jilid 4
 - 2) Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah
 - 3) Drs. Ghufron A. masadi, M.Ag. figh muamalah kontekstual
 - 4) Dan buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti.¹⁸

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nelayan *Mayangan* yang berjumlah 150 orang, pemborong yang berjumlah 30 orang, dan tokoh agama yang berjumlah 35 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

5 % dari 150 nelayan Mayangan adalah 8 orang yaitu Ngatmujud,
 Lasmuji, Syamsi, Utomo, Banggi, Sulikin, Mulyono, dan Sholihin

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108-109

- 2) 20 % dari 30 orang juragan pemborong adalah 6 orang yaitu Munasik, Muhammad Zurron, Muhammad Nazir, Taufiqur Rahman, Kasmujud, dan Ahmad Roqib
- 3) 6 tokoh Agama yang ada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu Amin Sakin, Umar Ali, Kartono Ali, Afnan Anshori, Ahmad Munir, dan Turmudzi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni, pengumpulan data yang secara riil (nyata) yang digunakan dalam penelitian¹⁹.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik observasi partisipasi.

Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam sirkulasi kehidupan obyek pengamatan.²⁰

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 146

¹⁹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Taknis Penulisan Skripsi*, Cet II, 10

b. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa mengunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam penelitian ini penulis mengunakan Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.²¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang pendapat tokoh agama terhadap hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menyajikannya sebagai tujuan orang lain.²²

Data primer dan skunder di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

²¹ Moh. Mujib Zunun, "Teknik Interview Penelitian Kualitatif", dalam <u>www.scribd.com</u> (05 februari 2009)

²² Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), 183

Metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set atau kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian pendapat tokoh agama terhadap hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan akan dideskripsikan.

Selanjutnya, dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola piker deduktif. Metode berpikir dedukif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus. Yaitu memaparkan praktek jual beli borongan, dan pendapat tokoh agama terhadap praktek jual beli borongan secara umum kemudian di jelaskan secara rinci satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika

²³ Ibid., 54

penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan melaui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Pada bab ini berisikan tentang pengertian jual beli dan jual beli borongan, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN MAYANGAN di KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Pada bab tiga ini berisi sekilas tentang keadaan Geografis Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, deskripsi tentang praktek jual beli borongan dan pro kontra pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAYORITAS PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI

BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN MAYANGAN di KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Bab ini merupakan pokok inti pembahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap mayoritas pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' bearti jual tetapi sekaligus berarti beli.²⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing sama. Menurut ulama' Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْه مَخْصُوْصِ. "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"

Cara khusus yang dimaksud adalah melalui ijab qabul antara penjual dan pembeli. Adapun definisi lain yang dikemukakan ulama' Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah:

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan pemilikkan. ',25

Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111 Ibid, 111

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁶

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia, karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Jual beli itu sendiri telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw dan jual beli itu sendiri mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi, diantaranya adalah:

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.......²⁷(Al-Baqarah:275)"

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²⁸(An-Nisa':29).

²⁸ *Ibid*, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁶ Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 58

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' sesungguhnya Nabi saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁹

Dari dalil-dalil di atas, para ulama' fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu mubah (boleh) dan boleh berubah menjadi wajib menurut pakar fiqh Maliki seperti sekelompok pedagang besar melakukan baikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.³⁰

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakn sah oleh syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Adapun rukun jual beli ada tiga (3), yaitu:

1. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual bel itu harus memenuhi syarat:

- a. Mumayyiz
- b. Cakap hukum
- c. Berakal sehat

²⁹ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3* (ed. Imam ibn Hajar), (Surabaya: al-Hidayah, 1985), 4

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 90

Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil yang belum mampu membedakan yang salah dan benar, orang gila, orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 5:

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".³¹

d. Pemilik barang.³²

2. Akad (ijab dan qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, karena dalam jual beli yang diperlukan adalah suatu kerelaan dan ijab qabul menunjukkan suatu kerelaan. Sabda Rasulullah saw:

³¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin dapat (boleh) dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan bersifat mengikat kedua belah pihak setelah diucapkan dalam akad jual beli yang berakibat pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

Adapun syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.³⁴
- c. Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tetentu.³⁵
- 3. Ma'qud alaih (objek jual beli)

Syarat-syarat barang yang diakad adalah sebagai berikut:

a. Suci (halal dan baik)

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ عَامُّ الْفَتْحِ وَ هُوَ بِمَكَة : إِنَّ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَة وَ الْخِنْزِيْرِ وَ الْأَصْنَامِ فَقَيْلَ يَا رَسُوْلُ اللهِ : أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَي بِهَا السُّفُنُ وَ تَدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا, هُو حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا, هُو حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ

³³Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3......*, 4.

³⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),116

ذَلِكَ :قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُوْمَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْ ثَمْنُهُ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah r.a sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda waktu fathul makkah: sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah saw melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa lemak itu lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya". (HR. Bukhari Muslim).

b. Bermanfaat

Benda tersebut memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti jual beli babi.³⁷

Tidak sahnya menjual barang yang tidak manfaat dan ditukar dengan harta sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil. 38 Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُو ٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَجْنَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

³⁶ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, Subulus Salam juz 3....., 5

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....,72

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 52.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa': 29).

c. Milik orang yang melakukan akad

Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Adapun barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut atau emas yang masih di dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret, maka tidak sah hukumnya, seperti jual beli ikan yang berada dalam air.

e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada jual beli taksiran.⁴⁰

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fighus Sunnah* (Nor Hasanuddin, Dkk, Fiqh Sunnah 4), 131

³⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, 107

Jual beli taksiran yang dikenal dengan jual beli jazaf adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara mendetail.⁴¹ Jual beli yang demikian ini untuk masa sekarang ini dapat disebut dengan jual beli borongan yakni jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tert entu.⁴²

Modelnya, kedua belah pihak melakukan akad atas suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti dengan cara melihat, kecuali dengan cara perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman.

Jual beli sistem borongan atau taksiran itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw dan beliau mengakui status jual beli ini, akan tetapi melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Sabda Nabi saw:

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya. 343 (HR. Muslim).

⁴¹ *ibid*, 132

Ahmad Sabiq, "Apa Hukum Jual Beli Borongan?," www.konsultasisyariah.com, (30 April 2010)
 Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz* 5, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah,1994),344.

Hukum asal dari jual beli taksiran adalah tidak boleh, karena dapat menimbulkan gharar atau penipuan, akan tetapi dapat berubah boleh ketika barang yang diperjualbelikan itu dipindahkan dari tempat semula.⁴⁴

Dalam jual beli yang terpenting adalah tidak terdapat suatu kerugian baik antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, hal ini karena tujuan dari jual beli adalah untuk meraih keuntungan seperti firman Allah dalam surat Fathir ayat 29, berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".⁴⁵

f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. 46

Dalam penerimaan benda yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara menyerahkan suatu barang antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, sehingga dapat dimanfaatkan.

Sedangkan penerimaan terhadap barang yang bergerak seperti makanan, pakaian, dan lain-lain adalah sebagai berikut:

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fighus Sunnah*, 123

⁴⁴ *Ibid*, 344.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 620

- 1) Dengan ukuran, timbangan dan takaran, jika dapat dilakukan.
- 2) Dengan cara memindahkan barang tersebut, jika jual beli dengan menggunakan taksiran.
- 3) Dengan berdasarkan kebiasaan yang berlaku apabila dua cara di atas tidak dapat dilakukan.⁴⁷

C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu: dari segi objek jual beli, segi pelaku jual beli, dan dari segi hukumnya.

Pertama, ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. Dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk bentuk, yaitu:

"Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada."48

Kedua, ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang diakukan oleh kebanyakkan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang menunjukkan maksud dan tujuan.

⁴⁷ *Ibid*,134 ⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*,75

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, misalnya via pos. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, akan teta pi melalui pos, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan menberikan barang tanpa ijab dan qabul seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual.⁴⁹

Ketiga, ditinjau dari segi hukumnya, suatu akad jual beli secara syara' sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Dari sudut pandangan ini Jumhur Fuqaha' membagi hukum jual beli menjadi dua: *pertama*, sahih yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, ghairu sahih yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya.

Dalam hukum jual beli ghairu sahih, Fuqaha' Hanafiyah membedakannya menjadi dua, yakni bathil dan fasid. Jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara' dan tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

⁴⁹ *Ibid*, 77-78.

Sedangkan jual beli fasid menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara', namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.⁵⁰

Adapun Contoh jual beli yang bathil:

a) Bai' ma'dum (Jual beli atas barang yang tidak ada)

Seluruh madhab sepakat atas batalnya jual beli ini, seperti jual beli janin dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum nampak. Sabda Rasulullah saw:

Artinya: "Dari abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan dan jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina".⁵¹

b) Bai' al-ma'juz al-taslim (Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan)

Misalnya jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan dalam sungai, dan lain-lain. Jual beli seperti ini adalah tidak sah. Hadis Nabi:

Artinya: "Dari abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw melarang jul beli hashah dan jual beli gharar." (HR. Muslim).

⁵⁰ Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Konstekstual....., 131

⁵¹ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, Subulus Salam juz 3....., 32

⁵² Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, Subulus Salam juz 3....., 15

c) Bai' gharar

Yakni jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Seluruh kasus akad jual beli *gharar* adalah tidak sah, termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli al-mulasamah, contoh aku jual baju itu kepadamu jika engkau menyentuhya.⁵³

d) Jual beli benda najis

Hal ini seperti jual beli babi, khamr, dan darah, karena semuanya itu najis dan tidak mengandung makna jual beli.⁵⁴ Hadis Nabi:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ عَامُّ الْفَتْحِ وَ هُوَ بِمَكَة : إِنَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَة وَ الْحَنْزِيْرِ وَ الْأَصْنَامِ فَقَيْلَ يَا رَسُوْلُ وَ هُوَ بِمَكَة : إِنَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَة وَ الْحَنْزِيْرِ وَ الْأَصْنَامِ فَقَيْلَ يَا رَسُوْلُ الله : أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَة فَإِنَّهَا تُطْلَي بِهَا السُّفُنُ وَ تَدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَ يَسْتَصِبْحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَيْهُودُ إِنَّ اللهَ لَيْهُودَ إِنَّ اللهَ لَهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِمْ شُهُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُو ثَمْنُهُ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah r.a sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda waktu fathul makkah: sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah saw melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa lemak itu lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya." (HR. Bukhari Muslim).

⁵³ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah....., 122

⁵⁴ Ibid 123

⁵⁵ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, Subulus Salam juz 3....., 5

e) Bai' urban

Yakni jika seseorang memberi sesuatu dengan membayar sebagian harta kepada pihak penjual jika pembeli mengurungkannya, maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai hibah.

Menurut jumhur selain Hanabilah jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur *gharar*. ⁵⁶ Sabda Rasulullah *saw*:

Artinya : "Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli urban (HR. Malik)."⁵⁷

Adapun contoh jual beli fasid adalah:

1. Bai' al-majhul

Benda atau barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, jika kemajhulannya (ketidak jelasannya) itu sedikit, jual belinya sah.⁵⁸

2. Bai' al-muallaq 'ala syarth

Yakni akad jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu, atau digantungkan pada masa yang akan datang. Misalnya perkataan penjual" aku jual rumahku kepadamu seharga X rupiah kepadamu jika fulan

⁵⁸ Nasrun Harun, Figh Muamalah....., 126

⁵⁶ Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Konstekstual....., 135

⁵⁷ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, Subulus Salam juz 3....., 7

menjual rumahnya kepadaku." Pada prinsipnya seluruh madzhab menganggap batal, namun Hanafiyah menyebut akadnya fasid.

3. Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian.

Jual beli buah-buahan sebelum nampak hasilnya dan menjualbelikan hasil pertanian sebelum tua tidak sah hukumnya ditakutkan akan ada kerusakan dan terserang penyakit sebelum waktu panen tiba.⁵⁹

Menurut ulama' Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Namun apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena sesuai dengan tuntutan akan benda yang dibeli harus sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fighus Sunnah*....., 149

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN MAYANGAN DI KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Blimbing merupakan salah satu wilayah bagian Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 93,430 ha, dengan luas pekarangan 25,430 ha, wilayah Kelurahan Blimbing berupa pantai dan berada di ketinggian 1 mdl dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 32°C, luas wilayah tersebut dibagi menjadi 12 RW dan 68 RT.⁶⁰

Kelurahan Blimbing mempunyai batas wilayah yang bersebelahan dengan desa lainnya, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kandang Semangkon, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Brondong, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Brondong Kecamatan Brondong.

⁶⁰ KPED Lamongan, "Data Profil Kelurahan Blimbing", dalam http://www.Lamongan.go.id. (01 agustus 2011)

Tabel . 1 Batas wilayah Kelurahan Blimbing.

g.			
Letak	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
Sebelah Utara	Laut Jawa	Dadapan, Sumber Agung	
Sebelah Selatan	Solokuro, Brondong	Kandang Semangkon	
Sebelah Timur	Paciran	Brondong	
Sebelah Barat	Brondong	-	

(Sumber: Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Letak wilayah Kelurahan Blimbing dari pusat pemerintahan Kecamatan Paciran adalah 5 km dengan waktu tempuh 0,15 jam, dan jarak ke Ibukota Kabupaten Lamongan adalah 49 km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

Tabel . 2 Batas wilayah Kelurahan Blimbing

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan Paciran	5 km
2.	Lama waktu tempuh ke Ibukota Paciran	0,15 jam
3.	Jarak ke Ibukota Kabupaten Lamongan	49 km
4.	Lama waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten Lamongan	1,5 jam
		-

(Sumber: Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah penduduk

Penduduk Kelurahan Blimbing termasuk dalam kategori produktif dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi di setiap tahunnya, pada tahun 2011 diketahui bahwa wilayah Kelurahan Blimbing dihuni oleh 5190 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk keseluruhannya mencapai 16.675 orang yang terdiri dari 8121 orang lakilaki, dan 8.554 orang perempuan.

Tabel. 3

Jumlah penduduk Kelurahan Blimbing

No.	uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	8.121 orang
2.	Perempuan	8.554 orang
3.	Kepala keluarga	5.190 orang

(Sumber: Daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Kecamatan penduduk yang terjadi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dipengaruhi juga akan banyaknya penduduk yang berasal dari luar Kelurahan yang mukim disana, hal ini karena pekerjaan yang didapat di wilayah tersebut dirasa lebih mudah, hanya bermodal kekuatan orang laki-laki dapat bekerja sebagai nelayan atau buruh perikanan tanpa mengandalkan ijazah pendidikan dan juga Kelurahan Blimbing merupakan tempat dengan tingkat penduduk yang dapat dinilai konsumtif baik di bidang makanan ataupun style, sehingga banyaknya pendatang yang mencari penghasilan di wilayah tersebut.

b. Mata pencaharian

Maju mundurnya masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh sistem perekonomiannya, adapun perekonomian masyarakat Kelurahan Blimbing diperoleh dari beberapa sektor, diantaranya adalah: perdagangan, pertanian, kelautan. Dari sektor perdagangan didukung dengan adanya pasar yang berada di perbatasan Kelurahan Blimbing dengan Kecamatan Brondong.

Dari sektor pertanian yang didukung dengan ladang yang berada di sebelah selatan dari rumah penduduk, dalam sektor ini tergolong dalam minoritas penduduk yang bekerja sebagai petani (151 orang) begitu juga dengan pedagang dan wiraswasta (124 orang).

Berbeda dari sektor kelautan, dalam sektor ini penduduk yang bekerja sebagai nelayan atau buruh usaha perikanan, serta pemilik usaha perikanan mempunyai prosentase yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan 6.745 orang, 103 orang pemilik usaha perikanan, 511 orang buruh usaha perikanan.⁶¹

Penduduk yang bekerja di sektor perikanan jauh lebih banyak dibanding dengan penduduk yang bekerja di luar sektor tersebut, hal ini dipengaruhi oleh laut yang berada di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

c. Sosial keagamaan

Penduduk Kelurahan Blimbing merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 16.659 orang, adapun penduduk yang memeluk agama selain Islam atau dalam hal ini memeluk agama Kristen berjumlah 16 orang. Banyaknya penduduk yang beragama Islam dapat dilihat dengan banyaknya bangunan masjid dan surau serta tempat

⁶¹ Dapat dilihat pada daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011

pendidikan Al-Quran yang merupakan media pembelajaran tentang agama Islam yang masih dipergunakan setiap hari oleh masyarakat sekitar.

Tabel . 4
Jumlah pemeluk agama di Kelurahan Blimbing

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	8.114 orang	8.545 orang	16.659 orang
2.	Kristen	7 orang	9 orang	16 orang
Jumlah 8.121 orang		8.554 orang	16.675 orang	

(Sumber: Daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Tabel. 5
Jumlah Masjid dan Musholla

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	10
2.	Musholla	10
Jumlah Total		20

(Sumber: Daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011).

d. Pendidikan

Pola pikir masyarakat yang semakin berkembang menjadikan masyarakat lebih maju dan menjadikan pola kehidupan masyarakat yang bersaing dalam pendidikan keluarganya, sehingga mampu menjawab perkembangan teknologi di masa sekarang ini.

Masyarakat Blimbing merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan penduduknya yang cukup maju yang dapat dilihat dengan adanya penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat sarjana (S-1 sampai S-3). Meskipun masih terdapat penduduk dengan status pendidikan yang masih rendah atau bahkan putus sekolah.

Masih adanya remaja yang mengalami putus sekolah dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang sehat, yaitu kurang adanya motivasi yang kuat dari lingkungan keluarga ketika anak tidak mau sekolah dan seakan membiarkan, bahkan pemikiran mereka meskipun tanpa ijazah sekolah mereka masih dapat bekerja asalkan memiliki kekuatan dan menikahkan anak perempuan mereka diusia muda.⁶²

Tabel . 6
Tingkat pendidikan penduduk

No.	Uraian	Jumlah	(%)
1.	Penduduk tidak tamat SD/ Sederajat	1.015 orang	7,71 %
2.	Penduduk tamat SD/ Sederajat	5.017 orang	38,11 %
3.	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	2.735 orang	20,8 %
4.	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	3.341 orang	25,4 %
5.	Penduduk tamat D-1	190 orang	1,44 %
6.	Penduduk tamat D-2	228 orang	1,73 %
7.	Penduduk tamat D-3	349 orang	2,7 %
8.	Penduduk tamat S-1	247 orang	1,9 %
9.	Penduduk tamat S-2	39 orang	0,29 %
10.	Penduduk tamat S-3	1 orang	0,01 %
Jumlah		13.162 orang	100 %

(Sumber: Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Tabel. 7 Remaja putus sekolah

Remaja putus sekolan				
No	Uraian	Jumlah	(%)	
1.	Remaja putus sekolah SD/ Sederajat	247 orang	11%	
2.	Remaja putus sekolah SMP/ Sederajat	718 orang	32%	
3.	Remaja putus sekolah SMA/ Sederajat	1.021 orang	45%	
4.	Remaja putus Kuliah	266 orang	12%	
Jumlah		2.252 orang	100%	

(Sumber: Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

 62 Siti Aminah, $\it Wawancara, Lamongan 25 April 2012$

B. Deskripsi Tentang Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Latar Belakang Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan
 Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli borongan hasil tangkapan nelayan mayanagan adalah transaksi jual beli terhadap seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal tanpa di timbang, di takar dan tanpa ukuran tertentu, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan desa yang masyarakat atau penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Hal itu sesuai dengan kondisi geografis desa terebut yang terletak di sebelah utara Kabupaten Lamongan yang mengantungkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan jual beli hasil tangkapan nelayan Desa Blimbing dan sekitarnya terpusat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Ada beberapa alternatif pilihan bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapannya salah satunya adalah jual beli secara borongan khususnya pada nelayan jenis *Mayangan*.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Lapangan, mengenai praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini sudah berlangsung sejak tahun 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan *Mayangan*. 63

Sistem yang awalnya tidak begitu di respon oleh nelayan sekarang menjadi prioritas utama nelayan untuk menjual hasil tangkapannya sampai saat ini karena lebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan nelayan itu sendiri.

Proses Pelaksanaan Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan
 Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai tempat sentral semua nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia tak terkecuali nelayan *Mayangan* Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam melakukan transaksi jual beli borongan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Melakukan beberapa tahapan, antara lain:

a. Memeriksa hasil tangkapan (ikan)

Memeriksa hasil tangkapan yang masih berada di dalam palkah (tempat penyimpanan ikan) bertujuan untuk memastikan kondisi ikan dari kualitas jenis dan kesegaran ikan yang diperoleh nelayan. Karena tidak dimungkinkan untuk melihat keseluruhan hasil tangkapan

_

⁶³ Munasik, *Wawancara*, Lamongan, 23 Februari 2012.

disebabakan kedalaman palkah yang mencapai 2.5 s/d 3.5. Maka informasi dari juragan kapal (nahkoda) dan anak buah kapal yang menjadi tumpuan pemborong.

b. Menentukan harga

Ikan yang diperoleh para nelayan tidak hanya satu jenis dan dari satu tempat saja, namun dari tempat yang berbeda-beda dari banyaknya kapal yang berlayar, hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas ikan yang diperoleh, begitu pula palkah (tempat penyimpanan ikan) berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas ikan.

Dengan kondisi hasil tangkapan yang masih berada di dalam palkah, serta banyaknya jenis ikan yang diperoleh dengan tingkat harga yang berbeda disesuaikan dengan kualitas jenis, ukuran dan kesegarannya, maka dalam menentukan harga pemborong harus melalui beberapa proses, diantaranya yaitu:

- 1. Menentukan kuantitas ikan hasil tangkapan
- 2. Menentukan kualitas jenis ikan hasil tangkapan
- 3. Mengetahui kondisi harga ikan di pasar.⁶⁴

c. Perjanjian

Jual beli borongan mempunyai dua bentuk perjanjian yaitu: Pertama, Perjanjian yang timbul secara langsung yaitu perjanjian yang

⁶⁴ Nazir, *Wawancara*, Lamongan 12 Mei 2012

timbul dari informasi yang diberikan juragan nelayan tentang kondisi hasil tangkapan dan hal tersebut yang dijadikan ukuran oleh pemborong. Jika informasi yang diberikan tidak sesuai, maka pemborong sering meminta ganti rugi atau membatalkan akad jual beli tersebut.

Kedua, Perjanjian yang timbul karena kesepakatan yaitu: perjanjian yang berkaitan dengan kerjasama antara pemborong dan nelayan tentang untung rugi yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

d. Ijab qabul

Transaksi antara penjual (nelayan) dan pembeli (pemborong) dilakukan di atas kapal ataupun di rumah juragan kapal, dan ijab qabul dilakukan setelah terjadi kesepakan harga dan atau perjanjian yang telah ditentukan oleh keduanya.

Setelah ijab qabul dilakukan, maka pemeliharaan ikan hasil tangkapan sebelum terjadi pembongkaran, pembayaran terhadap pemilih ikan dan pemikul ikan saat ikan dibongkar menjadi tanggung jawab pemborong.

e. Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan dua cara, pertama pembayaran dilakukan dengan memberikan uang secara keseluruhan sesuai dengan persetujuan dalam transaksi yang telah dilakukan. Kedua, pembayaran yang kedua ini merupakan pembayaran yang sering dilakukan pada

umumnya yaitu dengan memberikan uang sebagai panjar dan sisa uang yang telah disepakati diberikan setelah dilakukan pembongkaran ikan. Pembayaran diberikan oleh pemborong kepada nelayan *Mayangan* dapat diberikan di rumah juragan kapal atau di atas kapal.

f. Ganti rugi

Jual beli tidak selamanya memperoleh keuntungan, hal ini pula yang dialami oleh pemborong ikan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* yang terkadang mengalami kerugian.

Dalam persoalan kerugian, pemborong meminta ganti rugi kapada nelayan secara suka rela atau sudah mematok harga jika kadar kerugian sangat tinggi.

C. Pro Kontra Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan

1. K.H. Amin Sakin

K.H. Amin Sakin lahir di Lamongan, 30 Desember 1942. Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 04 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 1958, kemudian melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Kuliyatul Mualimin Islamiyah Gontor Ponorogo lulus pada tahun 1963, dan di tahun 1963 beliau melanjutkan studi S-1 di Pondok Pesantren K.H. Anwar Faqih Maskumambang Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik lulus tahun 1966.

Beliau dikenal sebagai Guru Agama dan tokoh Muhammadiyah di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi yaitu, Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pelajar Islam (GPI), dan Muhammadiyah. Kecakapan beliau dalam ilmu agama memposisikannya di Majelis Tarjih Muhammadiyah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam kaitannya dengan jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut K.H. Amin Sakin adalah sah, beliau mengatakan demikian karena melihat kondisi nelayan *Mayangan* yang lebih memprioritaskan jual beli borongan sebagai sistem yang lebih menguntungkan dan bisa menekan tingkat risiko yang ditanggung oleh nelayan.⁶⁵

Melihat kondisi di atas artinya antara nelayan (penjual) dan pemborong (pembeli) sudah sama-sama ridho. Dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

⁶⁵ Amin Sakin, *Wawancara*, Lamongan 20 Mei 2012.

Dan diperkuat hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah.

Menanggapi hasil tangkapan nelayan *Mayangan* yang masih berada diatas perahu, beliau mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi pekerjaan pemborong artinya pemborong merupakan orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar dari hasil tangkapan nelayan. Misalnya, dengan melihat sebagian hasil tangkapan dan informasi yang diberikan oleh nelayan, maka pemborong bisa memprediksikan kualitas dan kuantitas dari perolehan hasil tangkapan nelayan.

2. K.H. Umar Ali

K.H. Umar Ali, lahir di Lamongan pada tahun 1949. Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 04 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 1963, lalu beliau melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan lulus pada tahun 1969.

Pada tahun 1969 beliau melanjutkan S-1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin lulus pada tahun 1974. Beliau merupakan orang yang aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan seperti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Muhammadiyah. Jabatan yang pernah beliau terima yaitu menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Lamongan tahun 2007 dan sekarang menjabat sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁶⁶

Menurut K.H. Umar Ali bahwa asal hukum jual beli borongan adalah tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani yang berbunyi:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra darinnya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli buah buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu didalam tetek".

Menurut beliau bahwa jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang mengandung unsur gharar, karena dalam prakteknya jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* adalah menjual dan membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal sehingga tidak bisa dipastikan jumlah dan kualitas ikannya (jenis, ukuran dan kesegaran). Sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw melarang jual beli gharar." (HR. Muslim)

_

⁶⁶ Umar Ali, *Wawancara*, Lamongan 25 Mei 2012

3. K.H. Kartono Ali

K.H. Kartono Ali. Lahir di Lamongan, 28 Februari 1948. Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 04 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan lulus pada tahun 1961, kemudian melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Yayasan Taman Pendidikan (YTP) Roudhotul Ilmiyah Kertosono lulus pada tahun 1967.

Beliau dikenal sebagai Tokoh Muhammadiyah dan Guru sekaligus Pengurus di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Dengok Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.⁶⁷

Menurut K.H. Kartono Ali jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan jual beli gharar yang dilarang oleh Rasulullah saw sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw melarang jual beli gharar." (HR. Muslim)

Beliau berpendapat seperti itu karena melihat kondisi hasil tangkapan nelayan *Mayangan* yang masih berada di dalam palkah dengan berbagai jenis serta mempunyai tingkat harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁷ Kartono Ali, Wawancara, Lamongan 03 Juni 2012

jenis, ukuran, dan kesegaran serta pengaruh pasar yang tidak stabil membuat tingkat risiko yang ditanggung sangat besar dan tidak menguntungkan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan jual beli yang tercantum dalam surat Fathir ayat 29, berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

4. K.H. Afnan Anshari

Bapak Afnan Anshari lahir di Lamongan, 17 Agustus 1947. Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 04 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 1963, kemudian melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan lulus pada tahun 1969.

Pengalaman beliau dalam berorganisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lamongan pada tahun 2000-2005, dan sekarang beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lamongan sebagai Koordinator Bidang Ukhuwah, serta aktif di Dewan Pendidikan (DPL)Kabupaten Lamongan dan

beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Munawaroh Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Beliau berpendapat bahwa asal hukum dari jual beli borongan adalah tidak diperbolehkan hal ini hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani yang berbunyi:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra darinnya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli buah buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu didalam tetek".

Maka untuk menetapkan hukum jual beli borongan nelayan Mayangan harus melihat illat (sebab) yang membolehkannya. Sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

Artinya: "keteta pan hukum itu berkisar pada illatnya".

Dalam prakteknya, jual beli borongan yang dilakukan adalah membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal tanpa ditimbang, ditakar, dan tanpa ukuran tertentu, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Dengan melihat kondisi hasil tangkapan yang berbagai jenis dengan tingkat harga yang berbeda disesuaikan dengan kualitas jenis, ukuran dan kesegarannya serta pengaruh pasar. Menurut K.H. Afnan Anshori⁶⁸ jual beli itu tidak diperbolehkan karena kondisi hasil tangkapan yang belum jelas

⁶⁸ Afnan Anshori, *Wawancara*, Lamongan 06 Juni 2012

timbangan, takaran dan ukurannya sangat dimungkinkan terjadi manipulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw melarang jual hashah dan beli gharar." (HR. Muslim).

Melihat hadis diatas, walaupun jual beli itu sudah dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya dan dengan alasan apapun tetap tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum karena bertentangan dengan syara', hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Artinya: "Sesuatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara'."

Maka menolak mafsadah itu lebih didahulukann dari pada meraih kemaslahan yang bertentangan dengan syara':

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat".

5. Ahmad Munir

K.H. Ahmad Munir, lahir di Lamongan 14 Desember 1942.Menyelesaikan pendidikan Madrasah Islamiyah di Kecamatan Paciran,

kemudian melanjukan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Kecamatan Paciran. Beliau merupakan aktifis di organisasi sejak remaja, diawali dengan menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah Paciran tahun 1965, ketua majelis Diksdasmen Cabang Paciran tahun 1976 sampai 1990, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan pada tahun 1990 sampai 1995 dan Jabatan terakhir beliau sekarang adalah Wakil Ketua Majelis Tarjih PWM Jatim dan aktifitas keseharian beliau merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran dan Mudir di Pondok Pesantren Modern Paciran Kabupaten Lamongan.⁶⁹

Menurut K.H. Ahmad Munir bahwa asal hukum jual beli borongan adalah tidak di perbolehkan :

Artinya: "Dari abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan dan jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina".

Menurut beliau bahwa jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang mengandung unsur gharar, karena dalam prakteknya jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* adalah menjual dan membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal sehingga tidak bisa dipastikan jumlah dan kualitas ikannya (jenis,

⁶⁹ Ahmad Munir, Wawancara, Lamongan 15 Juni 2012.

ukuran dan kesegaran). Sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dia berkata, "saw melarang jual beli gharar." (HR. Muslim).

6. K.H. Turmudzi.

K.H. Turmudzi, lahir di Lamongan pada tahun 1942. Menyelesaikan pendidikan di Pendidikan Guru Agama (PGA) Kecamatan Paciran pada tahun 1965, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Yayasan Taman Pendidikan (YTP) Roudhotul Ilmiyah Kertosono pada tahun 1965-1968, beliau di kenal sebagai Tokoh Muhammadiyah.⁷⁰

Pendapat beliau terhadap jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* adalah tidak diperbolehkan, karena barang (ikan) masih dalam keadaan samar atau tidak bisa dipastikan jumlah dan kualitasnya. Walaupun sudah ada keridhoan antara kedua belah pihak, namun persoalan syubhat lebih baik dihindari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْد الله النَّعْمَانْ بنِ بَشِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ, وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ, وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَايَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ وَسَلَّمْ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ, وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ, وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَايَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبَراً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبْهَاتٍ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷⁰ Turmudzi, *Wawancara*, Lamongan 05 Juni 2012

كَالرَّاعِي يَرْعَي حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ, أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِك حِمِّى, أَلَا وَإِنَّ مَحَارِمُهَ, أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَّهُ, وَإِذَا فَسَدَاجَسَدُ كُلَّهُ, أَلَا وَهِيَ القَلْبُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: " Sesungguhnya perkara yang halal jelas, dan yang harom (juga) jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang samar samar. Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar samar, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar samar ini, maka dia telah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembala (ternaknya) disekitar tanah larangan maka lambat laun ia akan masuk kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa didalam tubuh (manusia) terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati ". (H.R. Bukhori dan Muslim).

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAYORITAS PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN *MAYANGAN* KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' bearti jual tetapi sekaligus berarti beli.71

Sedangkan menurut istilah jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷²

Hukum jual beli para Ulama' mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran dan hadis nabi yang berbunyi:

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),111.
 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا اللَّهِ

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.......⁷³(Al-Baqarah:275)"

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"."¹⁴(An-Nisa":29).

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' sesungguhnya Nabi SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli ghairu shahih seperti yang telah dijelaskan dalam bab II.

Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan penduduk yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Ini sesuai dengan kaadaan geografis yang letak wilayahnya

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 58

⁷⁴ *Ibid*. 107

⁷⁵ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3* (ed. Imam ibn Hajar), (Surabaya: al-Hidayah, 1985). 4

berada disebelah utara Kabupaten Lamongan yang sebagian besar berupa laut, Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan dari hasil laut, tetapi perolehannya kadang tidak sesuai dengan tenaga dan biaya operasional yang dikeluarkan.

Munculnya jual beli borongan sebagai alternatif untuk menjual hasil tangkapan nelayan sebagai upaya untuk mensejahterakan nelayan ternyata mendapat respon yang positif dari nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menjadi prioritas utama sampai saat ini karena lebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan nelayan itu sendiri.

Dalam prakteknya nelayan *Mayangan* menjual seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal tanpa diketahui secara jelas jumlah dan kualitasnya (jenis, ukuran dan kesegarannya), akan tetapi mengunakan taksiran.

Maka untuk menentukan harga pemborong harus mengetahui jumlah dan kualitas hasil tangkapan dengan cara melakukan pemeriksaan dan meminta informasi kepada juragan kapal maupun anak buah kapal yang berkaitan dengan daerah penagkapan ikan, kedalaman palkah (tempat untuk menyimpan ikan) dan lamanya melaut.

Dalam hal pembayaran dapat dilakukan secara kontan maupun dengan memberi panjar terlebih dahulu yang sisanya diberikan setelah pembongkaran sesuai dengan kesepkatan antara kedua belah pihak.

Dalam persoalan kerugian, pemborong meminta ganti rugi yang dibebankan kapada nelayan, baik kerugian itu di sebabkan karena ketidaksesuaian informasi yang dipeoleh dari nelayan terhadap kondisi ikan pada kenyataanya maupun kesalahan pemborong dalam menaksir harga.

Dalam prakteknya pemborong meminta ganti rugi secara sukarela dari nelayan atau sudah mematok harga terlebih dahulu sesuai dengan jumlah kerugian yang di alami oleh pemborong sesuai dengan kadar atau sebab kerugian yang dialami pemborong.

B. Pendapat Mayoritas Tokoh Agama Terhadap Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Sesuai dengan data yang dihasilkan penulis pada bab III menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat dari tokoh agama terhadap hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Perbedaan ini disebabkan karena kondisi hasil tangkapan yang belum bisa dipastikan jumlah dan kualitasnya (jenis, ukuran dan kesegaran). Menurut K.H. Amin Sakin bahwa prinsip jual beli adalah keridhoan antara kedua belah pihak, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 29 dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa':29).

Berdasarkan pada ayat dan hadis di atas, bahwa jual beli borongan yang dilakukan nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang diperbolehkan karena menurut beliau sudah ada kesepahaman atau kepercayaan yang terjalin antara nelayan (penjual) dan pemborong (pembeli) dengan melihat kondisi nelayan yang sangat memprioritaskan hasil tangkapannya dengan borongan.

Menanggapi kondisi barang yang belum dapat dipastikan jumlah dan kualitasnya (jenis,ukuran dan kesegaran), menurut beliau jual beli borongan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama oleh nelayan sebelum *Mayangan* yaitu nelayan *poursine*, dan pemborongpun merupakan orang lama artinya mereka sudah berpengalaman dan mampu untuk menentukan jumlah dan kualitas (jenis, ukuran, dan kesegaran) dari hasil tangkapan nelayan *Mayangan* dan adat kebiasaan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

⁷⁶ *Ibid.* 107

Berbeda dengan mayoritas tokoh agama yang menetapkan hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* adalah tidak diperbolehkan karena jual beli ini di qiyaskan seperti jual beli barang yang belum masak sehingga terdapat unsur gharar didalam hadis yang diriwatkan oleh imam muslim yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar." (HR. Muslim).

Maka kebiasaan yang dilakukan nelayan *Mayangan* saat ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syara' dan tidak sesuai dengan tujuan syari'at yaitu untuk kemaslahatan umum dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum yang tidak bertenta ngan dengan syara".

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Mayoritas Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Menurut mayoritas tokoh agama bahwa asal hukum jual beli borongan adalah tidak diperbolehkan, hal ini disandarkana pada hadis\yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashah dan jual beli gharar." (HR. Muslim).

Dari hadis di atas telah jelas melarang jual beli barang yang tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan kualitas dan kuantitasnya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.

Melihat keberadaan hasil tangkapan yang masih bercampur di dalam palkah kapal (bagian kapal yang dijadikan tempat untuk menyimpan ikan) dengan perolehan hasil tangkapan yang berbagai jenis serta tingkat harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas jenis, ukuran, dan kesegaran hasil tangkapan serta ketidak stabilan harga pasar. Menurut mayoritas tokoh agama di kelurahan blimbing kecamatan paciran kabupaten lamongan sepakat menqiaskan jual beli borongan yang dilakukan nelayan *Mayangan* adalah sama halnya dengan jual beli ijon yaitu jual beli terhadap barang yang tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan kualitas dan kuantitasnya, atau karena tidak mungkin dapat di serah terimakan. Dengan menyandarkan beberapa hadis sebagai berikut:

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan dan jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina".

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra darinnya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli buah buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu didalam tetek".

Berdasarkan hadis diatas bahwa jual beli borongan yang dilakukan nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara'.

Namun melihat kondisi nelayan yang saat ini lebih memilih sistem borongan sebagai sistem untuk menjual hasil tangkapannya, maka jual beli tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum jual beli borongan. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَة

Artinya: "Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum"."

Dan jual beli borongan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman sahabat Rasulullah saw. Sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya." (HR. Muslim).

⁷⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz* 5, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994),344

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 78

Dari hadis di atas menunjukkan persetujuan Rasulullah saw terhadap kebolehan jual beli borongan. Melihat kondisi hasil tangkapan nelayan yang tidak dapat dipastikan kuantitas dan kualitasnya namun hal itu dapat diperkirakan secara adat dan bisa diserahterimakan setelah akad berlangsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bahwa:

- Bahwa praktek jual beli borongan dilakukan dengan menjual belikan seluruh hasil tangkapan yang masih berada diatas kapal tanpa diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan pembayaran dilakukan secara lansung maupun dengan memberikan panjar terlebih dahulu.
- 2. Para tokoh agama setempat berbeda pendapat dalam menetapkan hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip jual beli yaitu keridhoan dan sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dan tidak bertentan gan dengan syara'.
 - b. Bahwa jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena jual beli tersebut merupakan jual beli gharar yang barangnya belum bisa dipastikan jumlah dan

- kualitasnya (jenis, ukuran dan kesegaran), dan menjadi suatu kebiasaan yang bertentangan dengan syara'
- 3. Analisis hukum Islam terhadap mayoritas pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam pandangan hukum Islam bahwa asal hukum dari jual beli borongan adalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur tipu daya yang merugikan salah satu pihak.
 - b. Dalam pandangan hukum Islam bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan ketetapan hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan*.

B. Saran

- Hendaknya KUD. Minatani sebagai penyelenggara jual beli di tempat perlelangan ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong mengupayakan kembali sistem perlelangan secara efektif.
- 2. Hendaknya para nelayan *Mayangan* memperhatikan sistem jual beli yang mampu memberi keuntungan bagi pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur manipulasi dalam jual beli yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam. Jakarta, Amzah, 2010.
- Ahmad Djajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, Jakarta, Kencana, 2007.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif. Surabaya, Airlangga University Press, 2001.
- Burhan Bungin ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dian Novianti, "Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayangan Kabupaten Jombang," Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah, Surabaya, 2011.
- Eni Fauziyah, "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh), Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah, Surabaya, 2011.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstekstual*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, Figh Muamalah. Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Ibn Ismail Kahlaniy, Subulus Salam. Surabaya, Al-Hidayah, 1985.
- Muhajir Noeng, *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta, Rake Sarasia, 1994.
- Nasrun Harun, Figh Muamalah. Jakarta, Gaya Media Pertama, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Ed. Nor Hasanuddin, Fiqh Sunnah 4). Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2004.

- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan. Yogyakarta, Andi Offset, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Zani Nur Anisah, "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban," Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah, Surabaya, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya, Al-Hidayah, Cet. III, 1989.

Daftar Isian Potensi Kelurahan Blimbing Tahun 2011.

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Blimbing Tahun 2011.

Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cet II.

Ahmad Sabiq, "apa hukum jual beli borongan?", dalam <u>www.konsultasisyariah.com</u> (30 April 2010)

Bustamam Ismail, "Hukum Islam Tentang Muamalah" dalam http://hbis.wordpress.com (23 noember 2007)

KPED Lamongan, "Data Profil Kelurahan Blimbing", dalam http://www.Lamongan.go.id. (01 agustus 2011)

Moh. Mujib Zunun, "Teknik Interview Penelitian Kualitatif", dalam www.scribd.com (05 februari 2009)

Ali Fadlol, Wawancara, Lamongan 23 April 2012

Afnan Anshari, *Wawancara*, Lamongan, 06 Juni 2012

Ahmad Munir, Wawancara, Lamongan, 15 Juni 2012

Amin Sakin, Wawancara, Lamongan 20 Mei 2012

Kartono Ali, *Wawancara*, Lamongan, 03 Juni 2012

Nazir, *Wawancara*, Lamongan 12 Mei 2012 Siti Aminah, *Wawancara*, Lamongan 25 April 2012

Turmudzi, *Wawancara*, Lamongan 05 Juni 2012

Umar Ali, *Wawancara*, Lamongan 25 Mei 2012